

Komitmen Global dan Inisiatif Lokal Dibutuhkan dalam Suksesnya SDGs Catatan Kerja Panja SDGs BKSAP DPR RI

BKSAP-Inggris Raya. London dan Cardiff di akhir November 2016 tengah menanti datangnya musim dingin. Sejauh mata memandang pohon-pohon meranggas, dedaunan rontok, serta angin kencang nan dingin berhembus. Di tengah suhu yang mencapai minus tiga derajat Celsius, Panitia Kerja SDGs BKSAP DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Inggris dan Wales (28/11 - 1/ 12).

Delegasi Panja SDGs BKSAP dipimpin oleh Ketua Panja SDGs yang juga Ketua BKSAP DPR RI **Dr. Nurhayati Ali Assegaf**. Adapun anggota delegasi terdiri dari (1) **H. SYAIFULLAH TAMLHA, S.Pi, MS**, Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi PPP, Komisi I yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi Informatika, Intelijen; (2) **DR. EVITA NURSANTY, M.SC**, anggota Panja SDGs dari Fraksi PDIP, Komisi I yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi Informatika, Intelijen; (3) **H. HASNURYADI SULAIMAN**, anggota Panja SDGs dari Fraksi PG, Komisi VI yang membidangi Industri, Investasi, Persaingan Usaha; (4) **DR. CAPT. ANTON SIHOMBING**, anggota Panja SDGs dari Fraksi PG, Komisi V yang membidangi Infrastruktur dan Perhubungan; (5) **VENNA MELINDA**, anggota Panja SDGs dari Fraksi PD, Komisi X yang membidangi Pendidikan, Olahraga, Sejarah; (6) **IR. H. AHMAD HELMY FAISHAL ZAINI**, anggota Panja SDGs dari Fraksi PKB, Komisi X yang membidangi Pendidikan, Olahraga, Sejarah; (7) **HERI GUNAWAN, SE**, anggota Panja SDGs dari Fraksi Partai Gerindra, Komisi XI yang membidangi Keuangan dan Perbankan; (8) **IR. H. TJATUR SAPTO EDY, MT**, anggota Panja SDGs dari Fraksi PAN, Komisi III yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan; (9) **H. JAZULI JUWAINI, LC., MA**, anggota Panja SDGs dari Fraksi PKS, Komisi II (Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu); dan (10) **AMELIA ANGGRAINI**, Panja SDGs dari Fraksi Partai Nasdem, Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan).

Tulisan berikut adalah catatan kerja Panja SDGs selama kunjungan kerja di London dan Cardiff.

Indonesia berbagi sejarah dengan Inggris dalam proses penyusunan SDGs mengingat peran signifikan Perdana Menteri David Cameron dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kurun 2012-2013 sebagai *co-chair* High Level Panel of Eminent Person (HLPEP) on the Post-2015 Development Agenda bentukan Sekjen PBB. Dalam setting global, Inggris dan Indonesia direpresentasikan sebagai negara maju dan negara berkembang.

Menurut Ketua Panja SDGs Dr. Nurhayati Ali Assegaf kunjungan teknis Panja SDGs ke Inggris dan Wales didasarkan atas pertimbangan bahwa Pemerintah Inggris dan Wales mengembangkan komitmen global dan inisiatif lokal terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lebih lanjut katanya: “Kunjungan teknis ke Inggris dan Wales sesuai dengan misi Panja SDGs yakni untuk mendapatkan informasi tangan pertama praktik cerdas dan implementasi SDGs di Inggris dan Wales.”

Dr. Nurhayati Ali Assegaf juga menekankan bahwa temuan dan praktik cerdas di Inggris dan Wales akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat rekomendasi Panja SDGs. Rekomendasi akan disampaikan kepada seluruh anggota DPR RI dan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen Global; Inggris dan Official Development Assistance

Di London, delegasi Panja SDGs BKSAP DPR RI menemui DFID sebagai penjurur (focal point) Pemerintah Inggris dalam bantuan pembangunan internasional.

DFID menjelaskan bahwa Inggris berkomitmen menyisihkan 0,7% dari pendapatan nasional untuk memenuhi target bantuan pembangunan internasional (ODA). Melalui mekanisme UKCCC, DFID memperpanjang bantuan perubahan iklim kepada Indonesia untuk masa 2015-2018 senilai GBP 50 juta.

DFID juga menginformasikan tiga hal yang menjadi prioritas bagi bantuan pembangunan internasional. Ketiga hal tersebut adalah: pertanian, energi terbarukan, dan program untuk pemerintah mendistribusikan pendapatan yang merata. Menurut DFID, ketiga hal tersebut dapat dimanfaatkan negara-negara berkembang dan terbelakang.

Di tengah suhu yang tidak bersahabat, Panja SDGs juga melakukan pertemuan dengan Komite Audit Lingkungan (EAC) Parlemen Inggris. Delegasi Panja SDGs diterima oleh Ketua Komite Mary Creagh dan beberapa anggota Komite seperti: Kerry Mc Carthy dan Glynn Davies.

Mary Creagh menjelaskan bahwa Parlemen Inggris mempunyai 13 komite. Ke-13 komite tersebut menjadi pengawas lembaga pemerintah yang menjalankan 16 goals dalam SDGs. Ia mencontohkan komite yang dipimpinnya secara efektif mengawasi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Dr. Nurhayati Ali Assegaf memaparkan kepada Parlemen Inggris bahwa Panja SDGs dibentuk terdiri atas anggota DPR RI dari lintas fraksi dan komisi. Ia berujar: “DPR RI berkomitmen menjalin kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah dan LSO untuk mensukseskan implementasi SDGs di lapangan.” Demi mendengar penjelasan Ketua Panja SDGs yang juga Ketua BKSAP, Mary mengapresiasi DPR RI yang mempunyai Panja SDGs yang menjadi penjuror parlemen dalam membantu dan mengawasi pemerintah dalam implementasi SDGs di lapangan. “Langkah Parlemen Indonesia membentuk Panja SDGs adalah langkah maju dalam menjalankan salah satu prinsip dalam SDGs yakni no one left behind,” ujar Mary mengapresiasi.

Mary Creagh juga mengapresiasi pertemuan Panja SDGs dan pemerintah serta parlemen Wales. Ia juga menyebut Undang-Undang Well-being Future Generation sebagai inisiatif Wales dalam memasukkan SDGs sebagai kerangka kerja pembangunan pemerintah Wales.

Inisiatif Lokal; Membumikan SDGs ala Wales

Jarak tempuh London-Cardiff yang memakan waktu sekira 2,5 jam tidak menghalangi delegasi Panja SDGs menyambangi Pemerintah dan Parlemen Wales. Dalam kunjungan ke Wales, Dr. Nurhayati Ali Assegaf dengan bersemangat mengatakan bahwa: “Kunjungan delegasi Panja SDGs dimaksudkan untuk bertukar pikiran dengan Pemerintah dan Parlemen Wales terutama terkait tentang UU the Well-being of Future Generation (The WFG Act) yang berkorespondensi dengan SDGs.”

Mark Drakeford yang menjabat Sekretaris Kabinet untuk urusan Keuangan dan Pemerintah Lokal menjelaskan bahwa UU WFG lahir dari pemikiran akan tanggung jawab generasi kini terhadap generasi masa depan. Wales menerapkan cara pandang baru konsep pembangunan nasional. Menurutnya Wales mengadopsi aturan global ke dalam tataran lokal yang lebih sesuai dengan kondisi Wales.

lebih lanjut kata Mark: “Undang-Undang the Well-being of Future Generation 2015 mulai berlaku efektif pada 1 April 2016. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya Wales dengan menugaskan pemerintah dan badan-badan publik untuk berpikir dengan lebih berkelanjutan dan berjangka panjang.”

Dalam paparannya, Mark menerangkan bahwa UU the Well-being of Future Generation 2015 menempatkan tujuh tujuan nasional yang ingin dicapai Wales dalam mencapai kesejahteraan: (1) Wales yang sejahtera, (2) Wales yang tangguh, (3) Wales yang lebih sehat, (4) Wales yang lebih setara, (5) Komunitas Wales yang kompak, (6) budaya Wales

yang hidup dan mengembangkan bahasa Welsh, (7) Wales yang bertanggung jawab secara global.

Sementara itu, Ketua Komite Perubahan Iklim, Urusan Lingkungan, dan Pedesaan Parlemen Wales Mark Reckless menjelaskan peran Parlemen Wales dalam implementasi SDGs. Komite yang dipimpinnya didirikan untuk memeriksa UU dan memastikan pemerintah Wales dalam kebijakan perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, hewan, dan pertanian.

Ia sedikit menjelaskan perjalanan UU WFG. Mark menyebut bahwa konsep Pembangunan Berkelanjutan sudah dicanangkan Wales sejak 1998. Ia menyebut pada 2009, Pemerintah Wales melakukan lompatan besar dengan mengeluarkan One Wales: One Planet yang merupakan skema pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Pemerintah Wales. "Buku ini berisi penegasan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan strategis yang menyeluruh dari semua kebijakan dan program lintas portofolio semua kementerian," demikian kata Mark yang beberapa kali mengadakan kunjungan kerja ke Jakarta.

Lebih jauh menurut Mark Reckless, puncak pencapaian tersebut pada 2015 ketika Parlemen Wales mengesahkan UU the WFG yang merupakan inisiasi Pemerintah Wales.

Menurutnya di Wales sedang terjadi krisis kesehatan masyarakat, dan penggunaan energi yang efisien. Oleh karena itu, ia juga mengungkapkan bahwa Wales bertekad mengurangi karbon sebesar 28 % pada 2030 nanti.

Menanggapi isu perubahan iklim, Mark mengakui bahwa Indonesia dengan garis pantai yang panjang merupakan negara yang terdampak bencana dan rawan perubahan iklim ekstrem. Oleh karenanya, ia mendukung kemitraan Indonesia dengan pemangku internasional untuk menanggulangi perubahan iklim mengingat bencana akan berdampak luas terhadap dunia global. Merespons hal tersebut, Dr. Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa *climate change* lebih berbahaya ketimbang terorisme. Dalam amatnya, perubahan iklim memakan korban yang lebih banyak daripada terorisme. Untuk itu ia menghimbau agar semua pihak berkomitmen terhadap penanggulangan perubahan iklim. Lebih jauh katanya: "kalau mengenai terorisme negara-negara bisa bersatu padu, kenapa untuk masalah *climate change* kita tidak bisa?"

Menutup pertemuan, Dr. Nurhayati Ali Assegaf mengundang Parlemen Wales untuk berpartisipasi dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals yang akan dihelat BKSAP DPR RI pada Juni 2017 mendatang di Bali. (BKSAP)